

**PROBLEMATIKA ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**
(Suatu Kajian Empiris Di Pengadilan Negeri Surabaya)

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum UPN “ Veteran ” Jawa Timur



Oleh :

HELMY PERMONO
NPM : 0671010062

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
SURABAYA
2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul: **PROBLEMATIAK ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Kajian Empiris Di Pengadilan Negeri Surabaya)**

Penyusunan Skripsi untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang penulis dapat selama perkuliahan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Bapak Sutrisno, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
3. Bapak Drs. E.C. Gendut Sukarno,MS.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman SH,M.Hum Selaku SesProgdi sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kedua orang tua kami tercinta, serta seluruh keluarga besarku yang telah dan frevi yastini sbagai orang yang sangat sepesial bagi penulis yang memberikan dukungan moril maupun materiil serta doanya selama ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan karena kurangnya pengalaman dan terbatasnya pengetahuan yang penulis miliki.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan tersebut dengan kebaikan pula. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Desember 2011

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN ”

JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiwa : Helmi Permono
NPM : 0671010062
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 –Februari -1987
Progam Studi : Strata 1 (S1) Ilmu Hukum
Judul Skripsi :PROBLEMATIKA ASAS PEMBUKTIAN
TERBALIK ATAS KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DI INDONESIA. (Suatu Kajian Empiris
Di Pengadilan Negeri Surabaya)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan asas pembuktian terbalik tersebut di terapkan karena pada praktek nya pembuktian terbalik belum pernah di terapkan.metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dimana yang dimaksud kan yaitu ada suatu ketentuan hukum yaitu undang – undang akan tetapi belum ada penerapan nya ,pengumpulan data menggunakan Sumber hukum primer adalah literature, pendapat para ahli ,data-data dari internet, jurnal-jurnal. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian, berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum diperoleh sehingga dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pembuktian terbalik memang belum pernah diterapkan dan penyebabnya ialah masih banyak kelemahan dari pembuktian ini dan banyak terdakwa yang tidak menggunakan hak nya tersebut

KATA KUNCI : Fakta Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Dalam Proses
Peradilan Kasus Tindak Pidana Korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembuktian kasus korupsi baik di Indonesia dan beberapa negara asing memang dirasakan sangat pelik. Khusus untuk Indonesia, kepelikan tersebut di samping proses penegakkannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan UU yang produknya masih dapat bersifat multi interpretasi, sehingga relatif banyak ditemukan beberapa kelemahan di dalamnya. Salah satu contoh dapat dikemukakan di sini adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan UU disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga di perlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Tapi pernyataan tersebut dalam implementasinya, tidak semuanya benar. Misalnya, khusus terhadap tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa akan tetapi merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa.

Di samping aspek di atas, belum lagi opini umum dan para pakar yang menginginkan adanya pembuktian kasus korupsi dipergunakan beban pembuktian terbalik ,yang berasumsi dengan pembuktian terbalik kasus korupsi dapat diberantas. Mungkin pernyataan tersebut ada benarnya

Akan tetapi banyak mengundang polemik dan dapat diperdebatkan karena beberapa aspek. Pertama, dikaji dari sejarah korupsi dan perundang-undangan korupsi di Indonesia sejak penguasa perang pusat sampai sekarang ini ternyata banyak kasus korupsi belum dapat “diberantas” dan bahkan relatif meningkat intensitasnya berdasarkan survei lembaga pemantau korupsi di dunia. Selain itu juga, beberapa lembaga yang bertugas memantau korupsi pun telah dibentuk akan tetapi perbuatan korupsi juga tetap ada dan bahkan tambah marak terjadi. Kedua, belum ada justifikasi teori yang dapat dipergunakan sebagai tolak ukur untuk memberantas korupsi dengan mempergunakan beban pembuktian terbalik sehingga kebijakan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat berbuat secara optimal

Ada pun dilema bersifat krusial dalam perundang-undangan Indonesia tentang beban pembuktian terbalik. Pada ketentuan Pasal 12B dan Pasal 37, Pasal 38B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 diatur tentang beban pembuktian terbalik. Benarkah demikian dikaji dari aspek teoretis dan praktik? tidak. Secara tegas ada kesalahan dan ketidakjelasan perumusan norma tentang beban pembuktian terbalik dalam ketentuan Pasal 12B UU 31/1999 jo UU 20/2001. Ketentuan Pasal 12 B ayat (1) berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa ¹gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ; (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Ada beberapa kesalahan fundamental dari kebijakan legislasi di atas. Pertama, dikaji dari perumusan tindak pidana ketentuan tersebut menimbulkan kesalahan dan ketidakjelasan norma asas beban pembuktian terbalik. Di satu sisi, asas beban pembuktian terbalik akan diterapkan kepada penerima gratifikasi berdasarkan Pasal 12B ayat (1) huruf a yang berbunyi, “.. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi”, akan tetapi di sisi lainnya tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi oleh karena ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan redaksional, “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, maka adanya perumusan semua unsur inti delik dicantumkan secara lengkap dan jelas dalam suatu pasal membawa implikasi yuridis adanya keharusan dan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal yang bersangkutan. Tegasnya, asas beban pembuktian terbalik ada dalam tataran ketentuan UU dan tiada dalam kebijakan aplikasinya akibat kebijakan legislasi

¹ Kutipan dari artikel Dr .Iilik Mulyadi .doktor ilmu hukum universtas pajajaran , bandung , penulis buku ilmu hukum yang berjudul pembuktian terbalik tindak pidana korupsi

merumuskan delik salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada.

Berdasarkan diuraikan di atas, maka dapat dikatakan beban pembuktian terbalik dalam perundang undangan Indonesia “ada” ditataran kebijakan legislasi, akan tetapi “tiada” dan “tidak bisa” dilaksanakan dalam kebijakan aplikasinya. Untuk itu penulis tertarik mengangkat judul skripsi ini dengan “PROBLEMATIKA ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. (Suatu Kajian Empiris di Pengadilan Negeri Surabaya)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

- a. Mengapa asas pembuktian terbalik terhadap kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya tidak pernah diterapkan ?
- b. Apa kendala yang menyebabkan penerapan asas pembuktian terbalik kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya belum pernah diterapkan dalam persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab tidak diterapkannya asas pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya.

- b. Untuk mengetahui apa saja kendala aparaturnya sebagai penegak hukum dalam menerapkan asas pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dibidang pidana, khususnya mengenai asas pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan instansi terkait untuk lebih mengetahui dan mengerti penerapan asas beban pembuktian terbalik terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena di samping lebih efektif mengusut dan memerangi kejahatan tindak pidana korupsi tetapi juga dapat memberi kesempatan dan hak terdakwa pelaku tindak pidana korupsi untuk melakukan pembelaan atas dirinya bahwa dirinya tidak bersalah.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau

pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari :

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dan pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).²

1.5.2 Unsur Tindak Pidana

Tidak ada sebab maka tidak ada akibat maka dan itu tidak adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang maka tidak ada yang namanya perbuatan pidana. Seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana(selanjutnya disingkat dengan KUHP) buku kesatu tentang aturan umum, yaitu : “Suatu perbuatan tidak dapat di pidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Dan ketentuan perundang-undangan yang ada dapat kita tank beberapa unsur tentang tindak pidana sebagai syarat agar

² R.Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia , Edisi Revisi , Jakarta , PT Raja Grafindo Persada,2006, hal 175

dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang mengandung peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat- syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut:

- a. Harus adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
 1. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Harus berlawanan dengan hukum.
 3. Harus tersedia ancaman Hukumannya.

Pengertiannya adalah :

- a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu dilihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Peristiwa itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang di timbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang

tidak bisa dipersalahkan pelakunya pun tidak perlu mempertanggung jawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dan ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam ancaman darurat.

- a. Harus terbukti adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- b. Harus berlawanan dengan hukum, artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- c. Harus tersedia ancaman hukumnya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu membuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman

terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

1.5.3 Tindak Pidana sendiri di bagi menjadi 2 bagian, Pidana umum dan Pidana Khusus:

- a. Pidana umum : Hukum pidana yang berlaku umum.
- b. Pidana khusus : Hukum pidana yang berlaku bagi suatu tindak pidana tertentu, contoh Tindak Pidana Korupsi.

1.5.4 Tindak Pidana Korupsi

1.5.4.1 Pengertian Korupsi

Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukan suatu istilah yuridis, melainkan berasal dari kata latin “Corruptus” yang artinya suatu perbuatan yang busuk, busuk bejat, tidak, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.”³

Menurut Bayle perkataan “Korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.”⁴

Menurut Brooks “Korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban tanpa hak menggunakan kekuatan, kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi.”⁵

Dalam jenis tindak pidana korupsi ada 2 macam, yaitu:

- a. Administrative Corruption.

³A.Hamzah, Korupsi dalam Proyek Pembangunan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h.3

⁴Soedjono Dirdjosisworo, Fungsi Perundang-undangan dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, h.19-21

⁵Alatas, Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi, LP3ES, Jakarta, 1987, h.7

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Akan tetapi, individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri. Terdapat dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Against The Rule Corruption.

Korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum. Misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Terdapat dalam Pasal 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”⁶

Pengertian tentang Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

⁶Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.10

Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Adapun penggolongan subyek hukum tindak pidana korupsi menurut pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, meliputi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.”

Subyek hukum disini adalah orang yang dibebani hak dan kewajiban hukum. Sanksi pidana menurut “Roeslan saleh ialah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik itu.”⁷

Sanksi pidana di KUHP dikenal sanksi pidana minimum dan sanksi pidana maksimum. Untuk sanksi pidana minimum diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP yang menentukan: “Pidana penjara selama waktu tertentu

⁷A.Hamzah, dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, h.24

paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.” Sedangkan sanksi pidana penjara maksimum secara umum tertuang dalam pasal 12 Ayat (2) KUHP yaitu 15 tahun berturut-turut, dan juga dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP menentukan: “Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.”

Dikenal juga sanksi pidana penjara seumur hidup yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) sebagai berikut:

“Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu; boleh juga hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena bebarengan (*concursum*), pengulangan (*residivis*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (L.N 1958 No.127).”

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi:

- a) Hukum pidana umum adalah ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang.
- b) Hukum pidana khusus adalah karena peraturannya yang secara khusus yang ada kalanya bertitik berat kepada

kekhususan suatu golongan tertentu (militer dan yang dipersamakan) atau suatu tindak pidana tertentu seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi, korupsi dan lain sebagainya.”⁸

Prinsip pemberlakuannya bahwa hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum lebih dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan berat (*Extra Ordinary Crime*) sehingga diatur di luar KUHP yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU Korupsi), karena perbuatan ini selain dapat merugikan masyarakat juga dapat merugikan keuangan negara.

UU Korupsi meliputi sanksi pidana penjara yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan pasal 15, yaitu:

- a) Sanksi pidana minimum ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sanksi pidana penjara minimumnya adalah satu tahun, sedangkan dalam Pasal 2 Undang-undang

⁸E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM.PTHM, Jakarta, 1982, h.22

Nomor 31 Tahun 1999 sanksi pidana penjara minimumnya adalah empat tahun;

- b) Sanksi pidana penjara maksimal diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu selama 20 tahun dan bisa diperpanjang menjadi seumur hidup;
- c) Sanksi pidana denda minimal ini dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- d) Sanksi pidana denda maksimal dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Disamping ketentuan tersebut di atas dikenal juga Pidana Tambahan disamping pasal 10 KUHP yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak

yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada Terpidana.

1.5.5 Asas Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi

1.5.5.1 Pengertian asas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah sesuatu yang menjadi landasan berpikir atau dasar yang dijadikan pedoman untuk berbuat. Asas Hukum merupakan istilah yang tidak asing dalam ilmu hukum. Pengertian asas hukum itu sendiri telah banyak dirumuskan oleh para ahli. Dan di bawah ini beberapa pendapat tentang asas hukum:

1. Bellefroid : merumuskan asas hukum sebagai norma dasar yang dijabarkan dari bentuk positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang bersifat umum. Asas Hukum Umum itu, merupakan hukum positif dalam suatu masyarakat.
2. Menurut Eikima Hommes : Asas Hukum itu tidak boleh menganggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.
3. Liang Gie berpendapat bahwa Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyertakan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
4. Paul Scholten : mendefinisikan Asas Hukum sebagai kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum, yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya. Tetapi, yang tidak boleh tidak harus ada.

Kesimpulan :

Asas Hukum atau Prinsip Hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang umum sifatnya. Atau, merupakan latar belakang yang mendasari peraturan yang konkrit, yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut. Dan adapun beberapa macam asas hukum yaitu sebagai berikut :

1. Asas Legalitas
Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
2. Asas Keseimbangan
Yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum.

3. Asas Praduga Tak Bersalah
Yaitu tidak menetapkan seseorang bersalah atau tidak sebelum adanya putusan pengadilan yang tetap.
4. Asas Unifikasi
Yaitu penyamaan keberlakuan hukum acara pidana di seluruh wilayah Indonesia
5. Asas Ganti rugi dan Rehabilitasi.
Yaitu adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum.
6. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Yaitu pelaksanaan peradilan secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa
7. Asas Oportunitas
Yaitu hak seorang Jaksa untuk menuntut atau tidak demi kepentingan umum.⁹

1.5.6 Pembuktian Dalam Hukum Pidana Biasa

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hukum acara pidana itu: Bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya Hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP(Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).¹⁰

⁹ Di kutib dari wibesite, www.kamus.hukum.com pada hari kamis 15-12-2011

¹⁰ Kitab undang-undang hukum pidana ,semarang,cv aneka ilmu ,2004 ha 181

- a) Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

- b) Pasal 189 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- 2) Keterangan yang di berikan terdakwa yang di berikan di luar sidang dapat di gunakan untuk membantu mengemukakan bukti di sidang asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat di gunakan terhadap diri sendiri
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan dakwaan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti lainnya

1.5.7 Asas Beban Pembuktian Terbalik

Beban Pembuktian Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan secara wajar dan perpaduan antara sistem hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang. yaitu pada Pasal 173 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Pasal 173 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sesudah kesaksian dan bukti disampaikan oleh kedua belah pihak, Penuntut Umum dan penasihat hukum diberi

kesempatan untuk menyampaikan keterangan lisan yang menjelaskan tentang bukti yang diajukan di persidangan mendukung pendapat mereka mengenai perkara tersebut.

Dan sedangkan Pembuktian terbalik sebenarnya telah disebutkan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Bagian Penjelasan Umum, disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terdiri dari 5 (lima) ayat, tetapi setelah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dua ayat, yakni ayat (1) tetap atau tidak diubah atau dihapus, sedangkan ayat (2) diubah dengan penyempurnaan frasa yang berbunyi:

Keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya” diubah menjadi “pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.

Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempergunakan kata terdakwa, maka berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat(2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut:

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan Pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.¹¹

Demikian juga dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan sebagai berikut:

(1) Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination).

¹¹ Dajaja ,eramnsyah ,memberantas korupsi bersama KPK,Jakarta :sinar gafika 2009 hal 126

- (2) Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara negative menurut Undang-Undang (negative wettelijk).

Demikian juga pada alinea ke-12 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut:

Di samping itu, Undang-Undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Selanjutnya tentang pembuktian terbalik yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di dalam alinea ke-5 dan ke-6 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini.¹²

¹² Ibid , Dajaja ,eramnsyah ,memberantas korupsi bersama KPK,hal 129

Dengan menerapkan asas pembuktian terbalik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, dari penjelasan-penjelasan Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2) Terdakwa tindak pidana korupsi mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan perkara yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- 3) Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 - a) Sebagai pembuktian terbalik bersifat terbatas, karena terdakwa tindak pidana korupsi hanya diberikan hak tetapi tidak diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan terdakwa hanya diberikan kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 - b) Disebut sebagai pembuktian terbalik yang berimbang , karena meskipun kepada terdakwa tindak pidana korupsi diberi hak untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan diberi kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai

hubungan dengan perkara yang didakwakan, penuntut umum komisi Pemberantasan Korupsi masih mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

- a) Penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam membuat skripsi ini adalah penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum, dan pada hakekatnya ada dalam kebijakan legalisasinya akan tetapi tidak pernah dilakukan dalam praktiknya kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada agar dapat ditarik suatu kesimpulan logis. Empiris sendiri berasal dari kata empiri, yang artinya berdasarkan pengalaman atau empirisme yang artinya adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan dan pendapatan dalam praktek dan tidak perlu mempelajari teori.
- b) Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan dan teori yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 37, Pasal 38,38B UU No.31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, Tentang pembuktian terbalik

1.6.2 Sumber Data

Penelitian ilmu hukum empiris , sumber utamanya adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya bahan hukum saja, akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan skripsi ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, Observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti, dan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, skunder dan tersier, untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer adalah literatur ,pendapat para ahli ,data-data dari internet , jurnal-jurnal.

b. Bahan hukum sekunder.

1. UU No.31 tahun 1999 jo UU No 20 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Kitab Undang –undang Hukum pidana
3. Undang undang republik Indonesia no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dab bebas dari KKN

4. Undang-undang republik Indonesian no 30 tahun 2000
tentang komisi pemberantas korupsi

1.6.3 Pengumpulan Bahan dan Data

Untuk mengkaji suatu bahan atau data yang kita dapat baik dari buku atau pendapat para ahli serta internet sangat berbeda dengan pengumpulan data atau data dari ilmu lain . dalam penelitian ilmu hukum empiris untuk mengetahui fakta-fakta sosial atau permasalahan hukum dan struktur dan materi positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan–bahan hukum terkait data yang di maksud dalam penelitian hukum empiris adalah yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dan struktur dan materi hukum positif yang di peroleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait dimana bahan –bahan tersebut akan di tambahkan dengan pendapat para ahli.

1.6.4 Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan adalah editing yaitu membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban narasumber menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta lain-lain kegiatan dalam rangka lengkap dan sempurna

1.6.5 Metode Analisa Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian, berdasarkan prosedur pengumpulan bahan hukum diperoleh, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran secara utuh, ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan dokumen khusus yang menarik untuk diteliti yaitu kasus tindak pidana korupsi yang lebih tepatnya yaitu masalah pembuktian terbalik yang terdapat pada pasal 37, Pasal 38, UU No.31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 dengan demikian peneliti lebih fokus pada masalah yang lebih spesifik.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pemaparan dari sistematika penulisan ini bertujuan supaya di dalam proses penyampaian materi dari skripsi ini mudah dimengerti dan dipahami. Sistematika penulisan ini di bagi menjadi empat bab, yaitu :

Bab pertama Pendahuluan dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah ,rumusan masalah

pertama, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan penelitian.

Berikutnya pada bab kedua ini adalah ulasan dari rumusan masalah pertama yang berisi tentang problematika asas pembuktian terbalik yang terdapat pada Pasal 37 Undang-undang nomor 20 tahun 2001, apakah sudah diterapkan atau hanya sebagai wacana belaka, dalam bab dua akan dijelaskan sesuai fakta penelitian yang dilakukan penulis.

Bab ketiga adalah ulasan rumusan masalah yang kedua, yaitu apa kendala yang menyebabkan penerapan asas beban pembuktian terbalik, faktor apa saja yang menyebabkan baik faktor internal atau eksternal dan pertimbangan hakim dalam menerapkan asa ini.

Pada bab ke empat berisi tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan menyimpulkan semua permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dan telah di bahas, dan berisi rekomendasi yang telah di paparkan dalam bentuk saran.